

**IMPLEMENTASI PROGRAM TRIBINA DI KELURAHAN
ANTASARI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Administrasi Publik



**OLEH
NOVITASARI
NPM : 2022374**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
AMUNTAI
2025**

TANDA PERSETUJUAN

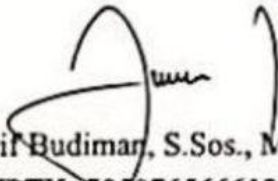
Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama :

Nama : NOVITASARI
NPM : 2022374
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM TRIBUNA DI
KELURAHAN ANTASARI KECAMATAN AMUNTAI
TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

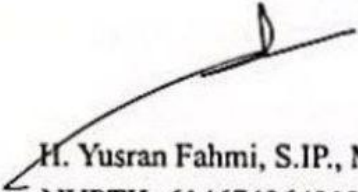
Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbing skripsi pada program studi administrasi publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, Oktober 2025

Pembimbing 1


Arif Budimar, S.Sos., M.AP
NUPTK. 7930765666130302

Pembimbing 2


H. Yusran Fahmi, S.IP., M.AP
NUPTK. 6146742643130113

Plt. Ketua Program Studi Administrasi Publik



Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat, inayah, dan hidayah-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Tribina di Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara”**.

Dalam penulisan proposal skripsi ini banyak sekali sumbangan pikiran dan pemberian data yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Reno Afrian, S.Sos., M.AP., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaqi S.Sos., M.A., selaku Plt Ketua Program Studi Administrasi Publik STIA Amuntai.
3. Bapak Arif Budiman, S.Sos., M.AP., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada penulis.
4. Bapak H. Yusran Fahmi, S.IP., M.AP., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada penulis.
5. Seluruh Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis.
6. Kedua orang tua yang selalu memberikan doa dan dukungan serta motivasi kepada saya untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.
7. Teman-teman penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Penulis juga ingin berterima kasih kepada Yuda yang telah membantu dan

mendukung penulis, khususnya saat proses bimbingan proposal skripsi ini.

9. Seluruh pihak yang turut berpartisipasi yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.

Penulis memohon maaf jika dalam pembuatan Proposal Skripsi ini terdapat kekurangan, dikarenakan keterbatasan penulis dan akan diperbaiki dikemudian hari. Semoga Proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Amuntai, Oktober 2025

Penulis

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Tinjauan Teoritis.....	11
1. Kebijakan Publik	11
2. Implementasi	14
3. Program Tribina.....	19
C. Kerangka Pemikiran.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Lokasi Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian.....	26
C. Tipe Penelitian.....	27
D. Data dan Sumber Data.....	27
E. Desain Operasional Penelitian	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31

G. Teknik Analisis Data.....	32
H. Uji Kredibilitas.....	33
DAFTAR PUSTAKA	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Kader BKB.....	4
Tabel 1. 2 Jumlah Kader BKR.....	4
Tabel 1. 3 Jumlah Kader BKL.....	5
Tabel 3. 1 Infoman penelitian.....	29
Tabel 3. 2 Desain Operasional Penelitian.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	25
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kualitas sumber daya manusia. Fungsi keluarga tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup fungsi sosial, pendidikan, perlindungan, dan pembinaan moral anggotanya. Keluarga yang berkualitas diyakini mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Oleh karena itu, pembangunan keluarga menjadi salah satu pilar penting dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya peran keluarga dalam pembangunan bangsa. Melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berbagai program telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas keluarga, salah satunya adalah Program Tribina, yang terdiri atas Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Program ini dirancang untuk memberikan pembinaan kepada keluarga yang memiliki anggota balita, remaja, dan lansia dengan pendekatan yang bersifat edukatif dan partisipatif. Tujuan utama dari program ini adalah membentuk keluarga yang mampu menjalankan fungsinya secara optimal pada setiap tahap perkembangan kehidupan anggotanya.

Program BKB bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua atau pengasuh dalam mengasuh dan mendidik anak balita secara optimal, baik dari segi kesehatan, gizi, maupun perkembangan

psikologisnya. Sementara itu, BKR bertujuan untuk meningkatkan pemahaman remaja dan orang tua dalam menghadapi masa remaja yang penuh tantangan, serta mencegah terjadinya perilaku berisiko seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan pernikahan dini. Adapun BKL ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia dalam keluarga melalui pendekatan sosial, emosional, dan spiritual agar mereka tetap merasa dihargai dan berdaya di usia senja.

Pelaksanaan Program Tribina memiliki dasar hukum yang kuat. Salah satu landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam Pasal 47 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pembangunan keluarga merupakan upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera, yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Selain itu, terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem informasi Keluarga yang memperkuat pelaksanaan program-program pembangunan keluarga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Di tingkat daerah, pelaksanaan Program Tribina menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bersama masyarakat, dengan dukungan dari kader dan tokoh masyarakat. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sejauh mana keterlibatan berbagai pihak, termasuk kader sebagai pelaksana utama di lapangan, serta partisipasi aktif dari keluarga-keluarga sasaran. Selain itu,

ketersediaan sarana dan prasarana, pelatihan kader, dan dukungan kebijakan daerah juga memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program.

Salah satu wilayah yang melaksanakan Program Tribina adalah Kelurahan Antasari, yang berada di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Kelurahan ini memiliki jumlah penduduk yang cukup padat dengan karakteristik sosial dan budaya yang beragam. Pelaksanaan Program Tribina di wilayah ini sudah berjalan, namun masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan pengamatan awal penulis dalam Program Tribina (BKB, BKR, dan BKL) di Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, ditemukan beberapa fenomena masalah yaitu:

1. Kurangnya Sosialisasi Program Tribina di Kelurahan Antasari

Berdasarkan observasi awal di Kelurahan Antasari, ditemukan bahwa Program Tribina belum tersosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari masih banyaknya warga yang belum mengetahui keberadaan maupun manfaat dari program BKB, BKR, dan BKL. Banyak orang tua yang memiliki balita, remaja, maupun lansia belum terlibat secara aktif dalam kegiatan pembinaan keluarga. Selain itu, terdapat ketimpangan tingkat kehadiran peserta Program Tribina antar-RT, di mana beberapa RT menunjukkan partisipasi yang cukup tinggi, sementara RT lainnya justru sangat minim atau bahkan tidak aktif sama sekali. Ketimpangan ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam akses informasi dan pembinaan keluarga di Kelurahan Antasari. *(Sumber data: Daftar Hadir kegiatan bulan Mei-September 2025).*

2. Kurangnya Kemampuan dan Sumber Daya Kader

Kader Tribina Kelurahan Antasari berjumlah 11 orang dengan pembagian 5 orang di BKB, 3 orang di BKR, dan 3 orang di BKL. Terdapat kader yang tidak bisa menggunakan sarana dan prasarana penunjang terutama pada kegiatan dan kader kurang memahami terlebih dahulu terkait materi yang disampaikan. Di tengah pelaksanaan program juga terjadi pergantian salah satu kader Bendahara BKR. Di sisi lain, sebagian peserta juga mengalami kesulitan dalam memahami informasi yang diberikan. Hal ini berdampak pada penyampaian pesan dan keberhasilan program dalam mengubah perilaku keluarga. (*Sumber data: Struktur kader Tribina di Kelurahan Antasari kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025*).

Tabel 1. 1
Jumlah Kader BKB

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin
1	Resti Yana Sari	Ketua BKB	Perempuan
2	Purnama Sari	Sekretaris BKB	Perempuan
3	Nurwahidah	Bendahara BKB	Perempuan
4	Radina Sahlini	Kader BKB	Perempuan
5	Hana Widiastuti	Kader BKB	Perempuan

Tabel 1. 2
Jumlah Kader BKR

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin
1	Novitasari	Ketua BKR	Perempuan
2	Ahmad Shaufi	Sekretaris BKR	Laki-laki
3	Akhmad Gajali	Bendahara BKR	Laki-laki

Tabel 1. 3
Jumlah Kader BKL

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin
1	Dewita Sari	Ketua BKL	Perempuan
2	Mariatun Nisa	Sekretaris BKL	Perempuan
3	Muziburrahman	Bendahara BKL	Laki-laki

3. Waktu Pelaksanaan Program yang Tidak Menetap

Pelaksanaan Program Tribina masih menunjukkan ketidakpastian dalam hal penjadwalan. Kegiatan Tribina sering kali dilakukan tanpa jadwal yang tetap. Meskipun tempat pelaksanaannya sama, setiap bulan jadwal kegiatan sering berubah-ubah, baik hari maupun tanggalnya. Hal ini menunjukkan bahwa belum terdapat pola waktu yang konsisten dalam pelaksanaan program. Kondisi tersebut membuat kegiatan terkesan tidak teratur dan mencerminkan belum adanya sistem penjadwalan yang terencana dengan baik. (*Sumber data: Daftar Hadir kegiatan bulan Mei–September 2025*).

Berdasarkan dari fenomena masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang **“Implementasi Program Tribina Di Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara”**.

B. Fokus Penelitian

Salah satu faktor penting dalam penelitian adalah dengan menentukan fokus penelitian. Perlunya fokus penelitian ini adalah untuk membatasi masalah dalam penelitian, sehingga objek yang akan diteliti tidak melebar dan terlalu

luas. Dalam hal ini fokus penelitian mengambil teori tentang Implementasi menggunakan teori menurut George Charles Edwards III dalam Leo Agustino (2022:154-158). Dalam teori tersebut ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat penulis ambil berdasarkan latar belakang di atas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Tribina di Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Pelaksanaan Program Tribina di Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Tribina di Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam Pelaksanaan Program Tribina di Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Untuk menambah dan memperluas wawasan pengetahuan Ilmu Administrasi Publik khususnya di bidang Implementasi Program Tribina di Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat guna pengembangan Ilmu Administrasi Publik dan juga untuk menambah pengetahuan mahasiswa lain serta sebagai bahan acuan untuk penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga yang berkaitan dengan Implementasi Program Tribina di Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan sebagai sarana untuk memperkaya Ilmu pengetahuan bagi penulis serta untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh selama belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Hariadi (2022) dalam penelitian yang berjudul **“Implementasi Program Bina Keluarga Remaja di Kampung KB Suwandi Mandiri Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarida Ulu, Kota Samarinda”** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori menurut George Charles Edwards III. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun penelitian lapangan yang digunakan adalah melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program BKR di Kampung KB Suwandi Mandiri dalam bentuk penyuluhan dan kegiatan terkait lainnya sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari komunikasi atau transmisi yang dilakukan implementor kepada taget sasaran berjalan dengan baik. Sumber daya manusia di Kelompok BKR Kampung KB Suwandi Mandiri dalam pelaksanaan program BKR sudah memadai. Namun dari segi anggaran, kelompok BKR Kampung KB Suwandi Mandiri tidak menerimanya secara rutin. Begitu juga dengan sumber daya fasilitas yang tidak memadai, kegiatan BKR hanya mengandalkan fasilitas yang tersedia saja walaupun tidak memadai. Para implementor khususnya dalam hal ini Kader BKR Kampung KB Suwandi Mandiri mempunyai komitmen, kejujuran dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan program

BKR. Dalam pelaksanaan Program BKR di Kampung KB Suwandi Mandiri kader-kader BKR berpedoman pada Buku Pedoman Pengelolaan BKR yang disusun secara sistematis guna tercapainya tujuan BKR tersebut. Beberapa kendala yang ditemui dalam Implementasi Program BKR di Kampung KB Suwandi Mandiri Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda yaitu terkait keterbatasan pelaksanaan kegiatan akibat Pandemi Covid 19, keterbatasan sumber daya Anggaran dan keterbatasan sumber daya Fasilitas. Walaupun terdapat kendala dalam pelaksanaannya, tidak menjadikan hal tersebut sebagai suatu alasan tidak terlaksananya program BKR dengan baik.

2. Jamiatul Mahfuzah (2024) dalam penelitian yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Program Tribina di Desa Sungai Bahadangan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara”** Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Pada penelitian pelaksanaan Program Tribina di Desa Sungai Bahadangan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara ditemukan fenomena masalah yaitu, Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan tribina, kurangnya kemampuan teknis dan keahlian kader, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kurang memperhatikan aspek gizi seimbang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Program Tribina di Desa Sungai Bahadangan Kecamatan Banjang menggunakan teori menurut Campbell J.P dengan hasil cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari indikator. Pertama, aspek keberhasilan program indikator kemampuan operasional kader dalam melaksanakan

program cukup efektif. Pada indikator mekanisme kegiatan sudah efektif. Kedua, aspek ketepatan sasaran dari indikator pencapaian tujuan cukup efektif. Pada indikator kebijakan dan prosedur kurang efektif. Ketiga, pada aspek kepuasan terhadap program berdasarkan indikator pemenuhan kebutuhan sudah efektif. Pada indikator Kualitas jasa layanan cukup efektif. Keempat, pada aspek tingkat input dan output berdasarkan indikator partisipasi masyarakat kurang efektif. Pada indikator Sarana dan prasarana sudah efektif. Kelima, aspek pencapaian tujuan menyeluruh berdasarkan indikator meningkatkan kesadaran cukup efektif. Pada indikator meningkatkan kemampuan dan peran serta keluarga cukup efektif. Adapun faktor yang mempengaruhi ada 2, faktor penghambat yaitu masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti Program Tribina dan tidak adanya prosedur pelaksanaan tribina yang tertulis dengan resmi. Faktor pendorongnya yaitu Kualitas layanan yang baik, sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang memadai.

Perbedaan penelitian ini dibandingkan dua penelitian terdahulu yang tertera diatas adalah penelitian ini menggunakan teori George Charles Edwards III dalam Leo Agustino (2022:154-158). Penelitian ini memfokuskan kepada empat unsur pokok yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam Implementasi Program Tribina. Selain itu, dibandingkan dua penelitian terdahulu ada beberapa perbedaan dalam fenomena masalah yang ditemukan. Penelitian ini juga merupakan penelitian pertama di STIA Amuntai yang membahas tentang Implementasi Program Tribina di Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun

persamaan mendasar dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan sama-sama meneliti tentang Program Tribina, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Definisi Kebijakan Publik

Menurut Leo Agustino (2022:1) “Kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasar pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Tidak hanya itu kebijakan publik kerap pula menyertakan partisipasi masyarakat guna menghasilkan keputusan terbaik”.

Kebijakan publik menurut Indra Kertati, dkk. (2023:1) secara umum dapat didefinisikan sebagai “Sebuah sistem berupa regulasi yang merupakan tindakan pengaturan, atau prioritas pendanaan mengenai topik tertentu yang diumumkan oleh entitas pemerintah. Dalam arti luas kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil pemerintah dalam mengatur masyarakat”.

Sementara itu, menurut Anderson dalam Marwiyah (2022:12) mendefinisikan ‘Kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan’.

Menurut Thomas Dye dalam Subarsono (2021:2) ‘Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*publipolicy is whatever governments choose to do or not to do*)’.

b. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Ciri-ciri kebijakan publik menurut Suharno dalam Marwiyah (2022:13) antara lain:

- 1) Kebijakan publik adalah tindakan yang mengarah pada tujuan sebagai perilaku atau yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- 2) Kebijakan pada hakekatnya terdiri dari tindakan yang saling berkaitan dengan pola yang mengarah pada tujuan tertentu dan dilakukan oleh pejabat pemerintah dan keputusan yang berdiri sendiri.
- 3) Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang, melainkan diikuti dengan keputusan yang ada sangkut pautnya dengan implementasi dalam pemaksaan pemberlakuan.
- 4) Kebijakan ada sangkut pautnya dengan apa yang menjadi pernyataan yang benar dilakukan oleh pemerintah dengan bidang tertentu.
- 5) Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, karena meliputi keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau melakukan yang akan menjadi masalah dengan itu pemerintah harus mengikuti/campur tangan dengan apa yang sudah terjadi/masalah yang ada.

c. Jenis Kebijakan Publik

Menurut James Anderson dalam Marwiyah (2022:13-14) menyampaikan bahwa kategori kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) Kebijakan substantif dan kebijakan procedural

Kebijakan substantif merupakan kebijakan yang menyangkut dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah tersebut. Sedangkan kebijakan prosedural merupakan bagaimana kebijakan dijalankan.

- 2) Kebijakan distributive, kebijakan regulatori dan kebijakan redistributive

Kebijakan distributif merupakan distribusi pelayanan atau pemanfaatan kepada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

- 3) Kebijakan material dan kebijakan simbolik

Kebijakan material merupakan kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya secara detail pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis merupakan kebijakan yang memberikan manfaat kepada kelompok sasaran.

- 4) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum dan barang privat

Kebijakan barang umum merupakan kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan barang privat merupakan kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

d. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William N. Dunn dalam Marwiyah (2022: 14-16) adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas dalam mengatur kebijakan publik. Dalam proses inilah ada di dalam ruang untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan publik, biasanya muncul karena telah terjadi saling berpendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang sudah selesai atau akan ditempuh mengenai karakter permasalahan tersebut.

- 2) Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, setelah itu masalah didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam

agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah.

3) Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi ialah memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sudah direncanakan harus didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol itu namun dimana melalui proses bagi warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

4) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

5) Evaluasi Kebijakan/Penilaian

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

2. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah sebagaimana diungkapkan oleh Jones dalam Syahrudin (2019:28), dimana implementasi diartikan sebagai "*getting a job done*" dan "*doing a*". Tetapi di balik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Namun pelaksanaannya, menuntut adanya syarat antara lain: adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut *resources*.

Sementara itu menurut Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Marwiyah (2022:36) melihat 'Implementasi adalah sebagai

pelaksanaan berbagai keputusan, baik berasal dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif”.

Sedangkan menurut Wahab dalam Marwiyah (2022:36) ‘Implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan’.

Menurut Riant dalam Joko Pramono (2022:2) ‘Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara kebijakan mencapai tujuannya, tidak lebih, tidak kurang. Ada dua langkah yang mungkin dilakukan dalam implementasi kebijakan publik. baik secara langsung berupa program maupun merumuskan strategi turunan atau turunan dari strategi tersebut. Kebijakan publik berupa undang-undang atau peraturan daerah merupakan jenis kebijakan yang memerlukan kejelasan kebijakan publik dan sering disebut perintah eksekutif. Kebijakan publik yang bersifat operasional langsung meliputi perintah presiden, instruksi presiden, perintah menteri, perintah direktur daerah, dan perintah direktur’.

b. Model Implementasi Kebijakan

1) Model George C. Edward III

Dalam pendekatan yang diteorikan oleh Edward III dalam Leo Agustino (2022:154-158) terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (i) komunikasi; (ii) sumber daya; (iii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi.

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut Edward III, adalah komunikasi. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu:

- a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*miskomunikasi*), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan

kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

- c) Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a) Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.
- b) Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c) Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- d) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi George C. Edward III, adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III, adalah:

- a) Efek Disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b) Melakukan Pengaturan Birokrasi (staffing the bureaucracy); dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya.
- c) Insentif; Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.

Variabel keempat, menurut George C. Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah:

- a) Membuat Standar Operating Procedures (SOPs) yang lebih fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparat, administrasi, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (days-to-days politics) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).
- b) Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung-jawab sebagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

2) Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam Leo Agustino (2022:150-153) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik yaitu:

a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan.

b) Sumber Daya

Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

c) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.

d) Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

e) Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

f) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

3) Model Merilee S. Grindle

Menurut Merilee S. Grindle dalam Leo Agustino (2022:159) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut:

- a) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- b) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - (1) Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - (2) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

4) Model Charles O. Jones

Menurut Jones dalam Leo Agustino (2022:169-170) dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama, yakni:

- a) Organisasi: Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.
- b) Interpretasi: Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
- c) Penerapan: Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

5) Model G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli

Menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam Subarsono (2021:101) ada empat kelompok variabel yang dapat memengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni:

- a) Kondisi lingkungan;
- b) Hubungan antar organisasi; Sumberdaya organisasi untuk
- c) implementasi program;
- d) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

6) David L. Weimer dan Aidan R. Vining

Dalam pandangan Weimer dan Vining dalam Subarsono (2021:103) ada tiga kelompok variabel besar yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni:

- a) Logika kebijakan;
- b) Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan; dan
- c) Kemampuan implementor kebijakan.

3. Program Tribina

Tribina adalah salah satu program utama yang dicanangkan oleh

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam

rangka membangun dan meningkatkan ketahanan serta kesejahteraan keluarga. Kata Tribina sendiri merupakan gabungan dari tiga jenis kegiatan pembinaan keluarga, yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Program ini bertujuan memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada keluarga agar dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan tahapan usia anggota keluarganya.

Melalui kegiatan Tribina, keluarga diberikan edukasi, pendampingan, dan berbagai aktivitas yang mendukung tumbuh kembang anak sejak usia dini, pembinaan mental dan sosial anak remaja, hingga perawatan yang tepat bagi anggota keluarga yang sudah lanjut usia. Dengan demikian, Tribina tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga menjadi bentuk nyata dari perhatian negara terhadap kualitas keluarga Indonesia secara menyeluruh.

a. Bina Keluarga Balita (BKB)

Bina Keluarga Balita atau disingkat BKB adalah program yang ditujukan kepada keluarga yang memiliki anak usia balita, yaitu anak yang berusia 0 sampai 5 tahun. Dalam program ini, orang tua khususnya ibu diberikan pembinaan dan informasi mengenai pola asuh anak yang benar, mulai dari cara memberi makan, cara berkomunikasi dengan anak, pemberian rangsangan untuk tumbuh kembang, hingga pemantauan kesehatan anak secara berkala.

Kegiatan BKB dilakukan dalam bentuk kelompok BKB di kelurahan, yang dipandu oleh kader atau penyuluh KB. Melalui kelompok ini, para orang tua bisa saling berbagi pengalaman, belajar dari ahli (misalnya petugas puskesmas), dan memantau tumbuh kembang balita.

Tujuan utama dari BKB adalah membantu orang tua menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif bagi tumbuh kembang anak, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Program ini juga sangat berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mencegah stunting dan membangun generasi yang sehat dan cerdas sejak usia dini.

b. Bina Keluarga Remaja (BKR)

Bina Keluarga Remaja atau BKR adalah program pembinaan yang diperuntukkan bagi keluarga yang memiliki anak remaja, biasanya yang berusia 10 hingga 24 tahun dan belum menikah. Masa remaja adalah masa yang sangat penting karena pada fase ini, seseorang mengalami banyak perubahan baik fisik, emosional, maupun sosial. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran penting dalam membimbing, mengawasi, dan mendampingi remaja agar tidak salah arah.

Melalui kegiatan BKR, orang tua diberikan pemahaman tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan anak remaja, bagaimana membangun hubungan yang terbuka dan saling percaya,

serta bagaimana menangani permasalahan khas remaja seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan risiko pernikahan dini.

Program BKR juga berperan dalam mendukung Generasi Berencana (Genre), yaitu program yang mengajak remaja untuk merencanakan masa depannya dengan baik, termasuk dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan pernikahan. Remaja diajarkan untuk mengenali perubahan dalam dirinya dan diajak untuk berpikir kritis, bertanggung jawab, dan memiliki cita-cita.

Tujuan utama BKR adalah menyiapkan remaja agar tumbuh menjadi pribadi yang sehat, bertanggung jawab, dan mampu membuat keputusan yang bijak, serta menghindari perilaku berisiko yang bisa merusak masa depan mereka.

c. Bina Keluarga Lansia (BKL)

Bina Keluarga Lansia atau BKL adalah program pembinaan yang diperuntukkan bagi keluarga yang memiliki anggota lanjut usia (lansia). Lansia merupakan bagian dari keluarga yang tetap harus diperhatikan dan diberdayakan. Dalam program BKL, keluarga diajak untuk memahami kebutuhan lansia, baik dari segi kesehatan, psikologis, maupun sosial.

Melalui kegiatan BKL, anggota keluarga diberikan informasi mengenai cara merawat lansia, cara berkomunikasi yang baik dengan lansia, serta cara menjaga kesehatan dan aktivitas fisik lansia agar tetap produktif dan mandiri. Selain itu, lansia juga diberikan ruang

untuk berkegiatan bersama, seperti senam lansia, pemeriksaan kesehatan rutin, diskusi kelompok, dan kegiatan keagamaan atau sosial lainnya.

BKL bertujuan untuk membangun kesadaran keluarga agar tidak mengabaikan lansia, serta menciptakan lingkungan yang ramah lansia, di mana mereka tetap merasa dihargai dan memiliki peran dalam keluarga maupun masyarakat. Dengan adanya BKL, diharapkan lansia dapat menjalani masa tuanya dengan sehat, bahagia, dan bermartabat.

Secara umum, Program Tribina (BKB, BKR, dan BKL) merupakan strategi pemerintah dalam membangun kualitas keluarga Indonesia dengan pendekatan yang menyeluruh dari usia balita, remaja, hingga lansia. Setiap tahapan usia memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda, dan keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Melalui kegiatan yang dilakukan dalam Tribina, keluarga diharapkan mampu mengasuh anak secara optimal, mendampingi remaja agar terhindar dari hal-hal negatif, dan merawat lansia dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Program ini merupakan upaya konkrit dalam menciptakan keluarga yang tangguh, harmonis, dan sejahtera, yang pada akhirnya akan mendukung terwujudnya masyarakat dan bangsa yang kuat.

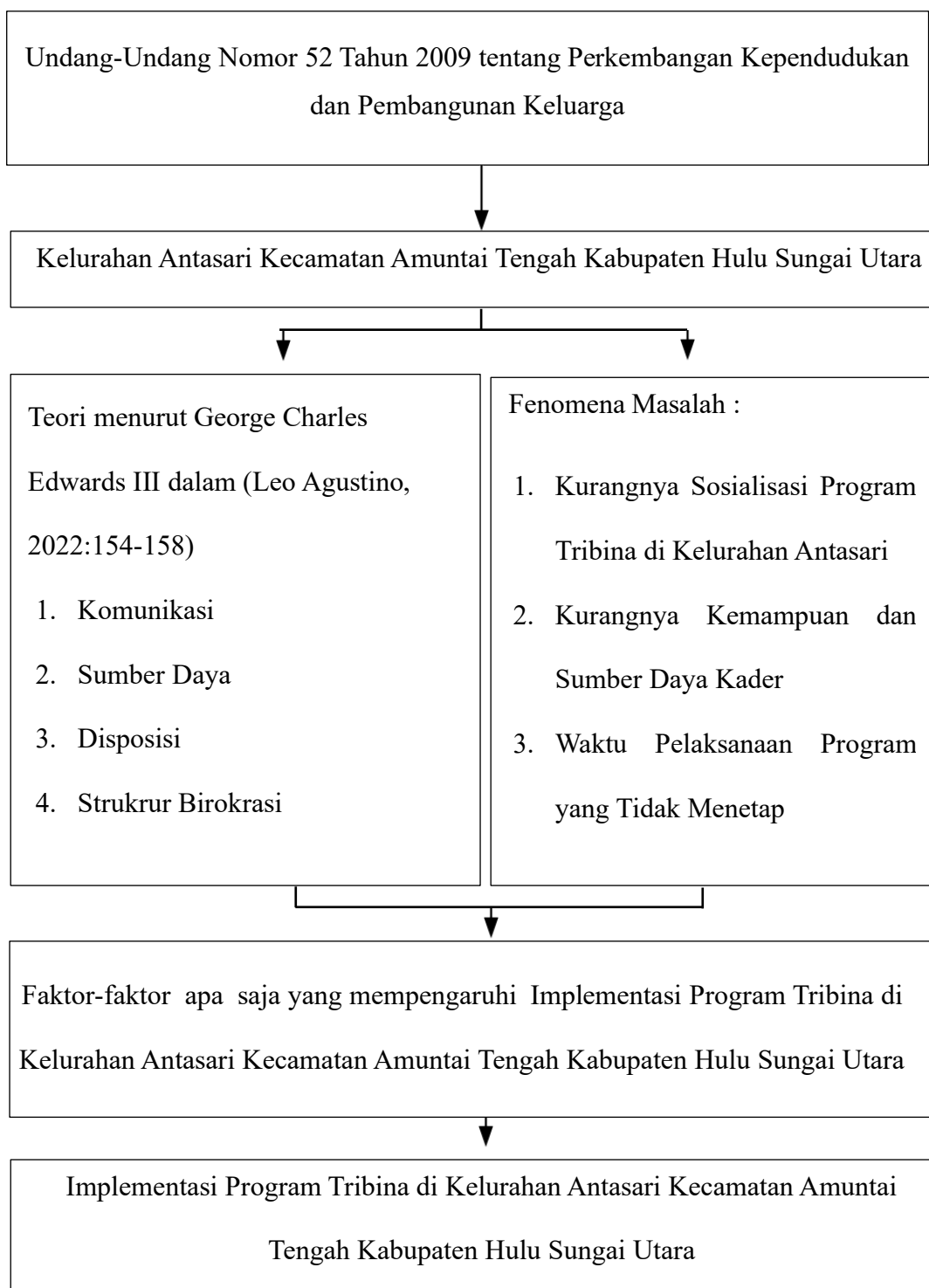
C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem informasi Keluarga, maka pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melaksanakan program pembinaan keluarga berkelanjutan yang dikenal dengan nama Program Tribina, yang terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Tribina di Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan, serta bagaimana faktor-faktor pendukung maupun penghambat memengaruhi pencapaian tujuan program tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil teori tentang Implementasi menggunakan teori menurut George Charles Edwards III dalam Leo Agustino (2022:154-158). Dalam teori tersebut ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian dilakukan. Lokasi yang menjadi objek penelitian ini bertempat di Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 71419.

B. Pendekatan Penelitian

Menurut Zuchri Abdussamad (2021:30) “Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan”.

Menurut Kaelan dalam Ibrahim (2018:53) ‘Pendekatan kualitatif dalam penelitian dicirikan dengan kesadaran bahwa dunia dengan berbagai persoalan sosial bersifat nyata, dinamis dan bersifat multidimensional, karena tidak mungkin dapat didekati dengan batasan-batasan yang bersifat eksakta (pasti dan matematis)’.

Sementara itu, menurut Bogdan dan Taylor dalam Zuchri Abdussamad (2021:30) menyebutkan bahwa ‘Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara *holistic*'.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.

Menurut Sugiyono dalam I Made Sudarma Adiputra, dkk. (2021:45) 'Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan objektif'.

Definisi Metode deskriptif kualitatif menurut Kim, Sefcik and Bradway dalam Ahmad Fauzi (2022:24-25) adalah 'Metode penelitian yang penting dan sangat cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berfokus pada pertanyaan siapa, apa, dan di mana peristiwa atau pengalaman terjadi dan mendapatkan data langsung dari informan mengenai fenomena yang kurang dipahami. Hasil dari deskriptif kualitatif adalah informasi empiris yang faktual'.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Menurut Nazar Naamy (2019:116) berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk

mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, dan diskusi terfokus (*focus grup discussion* – FGD).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

Data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung memberikan keterangan maupun data yang mendukung data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan baik berupa buku-buku, jurnal dan lainnya. Serta dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian. Selain itu juga didapat dari literatur di internet, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai Implementasi Program Tribina di Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah informan. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Sumber data pada penelitian ini sesuai dengan teknik pemakaian sumber data utama sebagai informan dengan menggunakan teknik

penarikan sumber data yaitu *Purposive sampling*.

Purposive sampling adalah teknik penarikan data yang dilakukan dengan mengambil sebagian dari populasi atau keseluruhan dari sumber data yang ada dengan pertimbangan yang didasarkan pada informasi yang tersedia serta sesuai dengan penelitian yang sedang berjalan sehingga perwakilannya dapat diterima dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Informan Penelitian

No	Jabatan	Keterangan
1	Lurah Kelurahan Antasari	1 Orang
2	Penyuluh KB Kecamatan Amuntai Tengah	1 Orang
3	Ketua BKB	1 Orang
4	Sekretaris BKB	1 Orang
5	Bendahara BKR	1 Orang
6	Sekretaris BKR	1 Orang
7	Ketua BKL	1 Orang
8	Sekretaris BKL	1 Orang
9	Masyarakat Kelurahan Antasari	6 orang
Jumlah Informan		14 Orang

E. Desain Operasional Penelitian

Desain operasional penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasil lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah.

Penelitian ini yang berjudul Implementasi Program Tribina di Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara menggunakan teori menurut George Charles Edwards III dalam Leo Agustino (2022:154-158) ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (i) komunikasi; (ii) sumber daya; (iii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai desain operasional penelitian yang digunakan pada penelitian ini dapat kita lihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Implementasi Program menurut Teori George Charles Edwards III dalam Leo Agustino (2022:154-158)	Komunikasi	1. Penyaluran Informasi 2. Kejelasan 3. Konsistensi
	Sumber Daya	1. Sumber Daya Manusia 2. Sarana Prasarana 3. Anggaran
	Disposisi	1. Komitmen/Tanggung Jawab 2. Pengaturan Birokrasi/Kesesuaian Penempatan Kader 3. Insentif
	Struktur Birokrasi	1. SOP 2. Koordinasi 3. Evaluasi

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang dipakai untuk mengumpulkan data-data penelitian. Dalam menulis maupun karya ilmiah, penulis harus menentukan teknik pengumpulan data yang sesuai dan tepat.

Menurut Sugiyono (2023:296) “Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan”.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan penelitian dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek di lapangan. Secara sederhana observasi diartikan sebagai cara melihat, memperhatikan, dan mencatat sesuatu yang ada di sekitar.

Menurut Riyanto dalam Hardani, dkk. (2020:125) ‘Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebelumnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Sedangkan observasi tidak langsung adalah mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek diselidiki dengan perantara sebuah alat. Pelaksananannya dapat berlangsung di dalam situasi yang sebenarnya maupun di dalam situasi buatan’.

2. Wawancara

Secara umum, wawancara merupakan komunikasi atau percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan secara lisan untuk

mendapatkan informasi.

Menurut Nazir dalam Hardani, dkk. (2020:138) ‘Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau reponden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara)’.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk gambar, kutipan, buku dan bahan referensi lain yang dapat mendukung penelitian.

Menurut Hardani, dkk. (2020:149-150) “Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Data- data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama.”

G. Teknik Analisis Data

Menurut Bongdan dalam Hardani, dkk. (2020: 161-162) *Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others.* Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis menurut Miles dan Huberman dalam Hardani, dkk. (2020:163-171) dibagi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reducation*)

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya, atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif dan deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan.

H. Uji Kredibilitas

Menurut Sugiyono (2023:365-371) uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber yang pernah ditemui maupun sumber baru. Dengan Perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data atau urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3. Tringulasi

Tringulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tringulasi sumber, tringulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

4. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan.

5. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

6. Mengadakan *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2022). *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Studi SI Administrasi Publik Amuntai*: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
- Anonim. PP No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.
- Anonim. UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press.
- Adiputra, I. M. dkk. (2021). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Denpasar: Yayasan Kita Menulis.
- Agustino, Leo. (2022). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Andusti, Nopian. (2023). *Lansia Tangguh dengan Tujuh Dimensi*. Jakarta: BKKBN.
- Ardiana, Irma. (2024). *Pedoman Penyelenggara Bina Keluarga balita Holistik Integratif (BKB HI)*. Jakarta: BKKBN .
- Fauzi, Ahmad. (2022). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: CV. Pena Persada.
- Hardani. dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.

- Hariadi. (2022). Implementasi Program Bina Keluarga Remaja di Kampung KB Suwandi Mandiri Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarida Ulu, Kota Samarinda. *Ilmu Pemerintahan*, 358-369.
- Ibrahim. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kertati, Indra. dkk. (2023). *Implementasi Kebijakan Publik (Dari Hulu ke Hilir)*. Jambi: PT Sonpedia Publishing indonesia.
- Mahfuzah, Jamiatul. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Program Tribina di Desa Sungai Bahadangan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Kebijakan Publik*, 835-844.
- Marwiyah, Siti. (2022). *Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*. CV Mitra Ilmu.
- Naamy, Nazar. (2019). *Medologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya*. Mataram : Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah.
- Pramono, Joko. (2022). *Kajian Kebijakan Publik Analisis Implementasi dan Evaluasinya di Indonesia*. Surakarta: UNISRI Press.
- Subarsono. (2021). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrudin. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media.